

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan hasil pembahasan mengenai peran pemerintah dalam pengelolaan objek wisata alam Aek Buru di Desa Batu Tunggal Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran dari hasil temuan peneliti, yaitu sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam pengembangan pariwisata alam Aek Buru di Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah desa cukup memiliki peran pada pengelolaan objek wisata Aek Buru Desa Batu Tunggal. Pemerintah Desa Batu Tunggal dalam pengelolaan desa wisata ditemukan memiliki beberapa peran, yakni peran sebagai fasilitator dan regulator. Peran sebagai fasilitator oleh pemerintah desa dengan memberikan fasilitas untuk desa wisata berupa tempat ibadah, toilet dan rest area. Selanjutnya pemerintah desa juga memberdayakan masyarakat di daerah wisata untuk meningkatkan ekonomi mandirinya dengan cara berjualan disekitar desa wisata. Sedangkan peran pemerintah sebagai regulator ditunjukkan dengan memberikan regulasi serta pengawasan pada desa wisata diantaranya kebijakan pemungutan parkir dan ketentuan lainnya.
2. Kendala dalam pengelolaan objek wisata alam Aek Buru di Kabupaten Labuhanbatu Utara secara umum dapat disimpulkan bahwa, pertama kondisi jalan yang buruk. Kedua, kepemilikan lahan yang masih dimiliki oleh PT. ASDA. Ketiga, musim yang berubah-ubah mengakibatkan kualitas wisata buruk. Keempat keterbatasan anggaran

yang menghambat perbaikan jalan dan promosi objek wisata Aek Buru yang secara keseluruhan kendala ini mengakibatkan rendahnya pendapatan asli desa yang diperoleh Desa Batu Tunggal.

5.2 Saran

Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peran pemerintah dianggap kurang optimal dengan demikian diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana pariwisata, seperti perbaikan jalan menuju objek wisata. Perlu penambahan pusat informasi pariwisata seperti plangisasi dan diperlukan penguatan iklan untuk mempromosikan objek wisata Aek Buruh
2. Pemerintah dapat melakukan restrukturisasi pengelolaan desa wisata, dengan terlibat secara aktif dalam pengelolaan desa wisata. Kemudian pemerintah dapat melakukan penganggaran ulang alokasi dana dalam rangka optimalisasi pengembangan desa wisata.